



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

---

# **Sekretariat Tim Kerja Konektivitas MP3EI**

**KLIPING  
BERITA MEDIA CETAK  
TIM KERJA KONEKTIVITAS**

---

**HARI SELASA, 5 MARET 2013**



DAFTAR ISI

Proyek Transportasi .....	1
Pelindo IV .....	2
Jembatan Batam-Bintan .....	3
Tol Transportasi .....	4
Bandara Yogyakarta .....	5



Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

# KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

## Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<input type="checkbox"/> Jan	<input type="checkbox"/> Feb	<input type="checkbox"/> Mar	<input type="checkbox"/> Apr	<input type="checkbox"/> Mei	<input type="checkbox"/> Jun	<input type="checkbox"/> Jul	<input type="checkbox"/> Agt	<input type="checkbox"/> Sep	<input type="checkbox"/> Okt	<input type="checkbox"/> Nov	<input type="checkbox"/> Des																			

2013

<input checked="" type="checkbox"/> Kompas	<input type="checkbox"/> Media Indonesia	<input type="checkbox"/> Koran Tempo	<input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia
<input type="checkbox"/> Republika	<input type="checkbox"/> Sinar Harapan	<input type="checkbox"/> Suara Pembaruan	<input type="checkbox"/> Pikiran Rakyat
<input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka	<input type="checkbox"/> Seputar Indonesia	<input type="checkbox"/> Investor Daily	<input type="checkbox"/> Kontan
<input type="checkbox"/> Suara Karya	<input type="checkbox"/> Neraca	<input type="checkbox"/> Jurnal Nasional	<input type="checkbox"/> Indopos
<input type="checkbox"/> Lain-lain, .....			

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Wujudkan Proyek Transportasi	<div>- Rencana induk pembangunan transportasi se-Jabodetabek harus segera dilaksanakan agar persoalan kemacetan di Jabodetabek bisa segera dituntaskan</div> <div>- Dengan koordinasi bersama dengan Pemerintah Daerah Jabodetabek, diharapkan transportasi di lima daerah tersebut bisa terkoneksi baik</div>			RP. 109 triliun (anggaran pemerintah) Rp.191 triliun (swasta)		

# Wujudkan Proyek Transportasi

## Kemacetan di Jabodetabek Terurai, Jakarta Bebas Macet Total Tahun 2014

JAKARTA, KOMPAS – Rencana induk pembangunan transportasi se-Jabodetabek tidak boleh hanya menjadi rencana. Rencana itu harus segera dilaksanakan agar persoalan kemacetan di Jabodetabek bisa segera dituntaskan. Prediksi tahun 2014 di Jakarta macet total pun tidak akan terjadi.

Demikian hasil rapat koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, mengenai rencana induk penataan transportasi angkutan darat dan kereta api, di Jakarta, Senin (4/3).

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendengarkan pemaparan dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Tundjung Inderawan.

Suroyo mengakui, sudah sejumlah studi untuk mengatasi kemacetan di Jabodetabek telah dilakukan. Namun upaya untuk pelaksanaan studi itu nyaris tidak ada. Demikian juga dengan rencana tata ruang wilayah yang

sudah dibuat, ternyata tidak ditaati. "Banyak contoh yang bisa dilihat. Jadi jangan sampai terulang kembali," kata Suroyo.

Hal senada dikatakan Jokowi. "Tidak perlu studi lagi. Terpenting, langsung dikerjakan berdasarkan rencana induk transportasi Jabodetabek," ujar Jokowi. Untuk mewujudkan rencana induk itu, bisa memakai anggaran negara, daerah, atau swasta. "APBN, APBD, ataupun dari investor bisa dipakai. Yang kita inginkan semua adalah pelayanan umum ini harus segera diwujudkan," ucapnya.

Dalam pemaparan mengenai kereta api, Tundjung mengatakan, membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

"Anggaran itu untuk pemba-

### PROGRAM PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN JABODETABEK

	Panjang (km)	Biaya (triliun rupiah)		Tahapan
		Pemerintah	Swasta/DUMN	
Double-double tracking Jalar Bekasi, elektrifikasi, dan peninggian	35	10	-	Pendek
Jalar Bandara Soekarno-Hatta (Commuter Line)	12,3	-	2	Pendek
Jalar Bandara Soekarno-Hatta (Express Line)	38	6	14	Menengah
MRT Timur-Barat (Balaraja-Cikarang)	90	50	65	Panjang
MRT Utara-Selatan (Kampung Bandan-Lebak Bulus)	23	33	-	Pendek dan menengah
Jalar kereta lingkar luar	60	10	-	Panjang
Monorel	327	-	110	Pendek dan menengah

#### Usulan Pelaksanaan Masterplan

	Jumlah penumpang (juta orang)	
	2014	2020
Bus transjakarta*	1,2	2,3
Bus pengumpan**	0,2	0,4
Kereta api Jabodetabek	1	1,2
MRT	-	0,9

Sumber: Litbang "Kompas"/RRI, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

www

ngunan double-double track, kereta bandara, monorel, dan mass rapid transit," kata Tundjung.

Untuk pembangunan itu, anggaran dari pemerintah diperkirakan Rp 109 triliun, sedangkan

dari swasta Rp 191 triliun.

Sementara untuk angkutan darat, rencana pembangunan difokuskan pada jaringan angkutan umum terintegrasi. "Tahun 2020 akan ada 30 trayek busway dan 15

trayek bus pengumpan. Diperkirakan jumlah penumpang mencapai 2,7 juta," kata Suroyo.

Untuk memenuhi kebutuhan itu maka dibutuhkan 738 bus gandeng dan 169 bus tunggal. Selain itu juga dibutuhkan pembangunan koridor busway, fasilitas park and ride, fasilitas integrasi antarmoda, dan fasilitas pejalan kaki serta pesepeda.

Dalam rapat koordinasi itu juga diusulkan untuk menunjuk penanggung jawab dari dijalankan rencana induk, dan dilakukan evaluasi program.

Bambang Susantono mengatakan, anggaran yang dipakai perpaduan antara APBN dan APBD setiap daerah yang terlibat. Dengan koordinasi bersama dengan Pemerintah Daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, diharapkan transportasi di lima daerah tersebut bisa terkoneksi baik, termasuk dalam bidang perkeretaapian.

"Ada yang APBN dan APBD dari Bogor, Bekasi, Jakarta, juga ada kontribusinya. Kita tidak melihat kontribusinya, yang penting kerja semua dan tetap terpadu. Kita ingin tahun 2014 tidak macet total," katanya. (ARN/ART)



Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

☐ Jan

☐ Feb

☒ Mar

☐ Apr

☐ Mei

☐ Jun

☐ Jul

☐ Agt

☐ Sep

☐ Okt

☐ Nov

☐ Des

2013

☐ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☒ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☐ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Pelindo IV Optimalkan Semayang	<div>- Pelindo IV Balikpapan tengah mengembangkan bisnis supply base dengan memanfaatkan lapangan kontainer Semayang yang tidak lagi banyak diisi oleh peti kemas</div> <div>- Dalam perkembangan lain, pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara sudah memasuki tahap penyusunan amdal</div>					

▶ ALIH FUNGSI PELABUHAN

Pelindo IV Optimalkan Semayang

BALIKPAPAN—PT Pelindo IV Cabang Balikpapan akan mengoptimalkan fungsi Pelabuhan Semayang menjadi pelabuhan penumpang, supply base, dan car terminal.

Rachmad Subiyanto & Master Sihotang  
redaksi@bisnis.co.id

Manajer SDM dan Umum Pelindo IV Balikpapan Teguh Haryono mengatakan pihaknya perlu mencari strategi bisnis baru pascaberalihnya aktivitas bongkar muat kontainer ke Terminal Peti Kemas (TPK) Kariangau. Fungsi pelabuhan sebagai terminal penumpang akan tetap berlangsung dengan perbaikan pada fasilitas yang perlu direnovasi.

"Tahun ini kami rencanakan untuk renovasi dan mempercantik terminal penumpang agar penumpang betah di dalamnya," ujarnya, Senin (4/3).

Teguh mengakui aktivitas pelabuhan tertinggi didominasi oleh kapal ro-ro yang sepanjang

tahun lalu mencapai 599 panggilan atau 43% dari total panggilan. Hal ini disebabkan oleh tingginya arus distribusi barang dari luar daerah ke Balikpapan.

Adapun untuk kapal penumpang, pihaknya mencatat hanya mendapatkan 230 panggilan sepanjang tahun lalu atau sekitar 17% dari total panggilan. Peningkatan arus penumpang biasanya terjadi hanya pada saat mudik atau tahun baru karena harga tiket pesawat udara yang hampir menyentuh batas atas.

Teguh menuturkan Pelindo IV Balikpapan tengah mengembangkan bisnis supply base dengan memanfaatkan lapangan kontainer Semayang yang tidak lagi banyak diisi oleh peti kemas. Masih prospektifnya bisnis pe-

ngeboran minyak di lepas pantai Selat Makassar menjadi salah satu alasan pengembangan bisnis Pelabuhan Semayang ke supply base.

"Sudah ada yang menjajaki peluang untuk kerja sama. Kami harapkan ini terealisasi dan bisa menarik pelaku bisnis lain untuk bekerja sama," tukasnya.

Adapun untuk car terminal, Pelindo Balikpapan akan memanfaatkan lapangan Tukung seluas 6.300 meter persegi guna menampung kendaraan sehingga tidak lagi menggunakan area jalan. Rencananya, Pelindo juga akan melakukan reklamasi untuk menambah luasan areal.

Teguh mengaku telah mengomunikasikan usulan ini kepada Pemkot Balikpapan dan telah memperoleh persetujuan. "Jadi, Pelabuhan Semayang akan lebih rapi karena kapal dengan muatan yang macam-macam dilokalisasi di Lapangan Tukung."

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Balikpapan Suryanto menambahkan pemerintah mendu-

kung pengembangan Pelabuhan Semayang menjadi supply base karena sifatnya yang hanya berhubungan dari laut ke laut. Namun, untuk bisnis car terminal, pihaknya masih keberatan karena akan memengaruhi kondisi lalu lintas di dalam kota.

"Kalau bisa yang semacam itu di TPK Kariangau saja. Kami juga masih menunggu pengembangan di sana karena baru 10 ha yang dikembangkan dari luas total 72,5 ha," tambahnya.

KUALA TANJUNG

Dalam perkembangan lain, pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, sudah memasuki tahap penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), sehingga pembangunan fisiknya dapat dimulai pada 2014.

Asisten Corporate Secretary Humas Pelindo I Medan Eriansyah mengaku tahapan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung baru memasuki penyusunan amdal, sedangkan studi kelayakan dan detail engineering de-

▶ Pelindo IV cari strategi baru untuk Semayang.

▶ Supply base manfaatkan lapangan kontainer.

▶ Proyek Pelabuhan Kuala Tanjung masuki tahap amdal.

sign (DED) sudah selesai.

"Kini tahapan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung sudah memasuki penyusunan amdal. Diharapkan pembangunan fisik sudah bisa dimulai pada 2014," ujarnya di Medan.

Tahun lalu, Pelindo I Medan menjalin kerja sama dengan PT Pembangunan Perumahan (PP) dan PT Utama Karya untuk membangun Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai hub port dengan investasi sedikinya Rp4 triliun.

Menurut Eriansyah, sesuai jadwal yang ditetapkan, memang kemajuan pembangunan Kuala Tanjung masih pada tahap yang wajar mengingat perizinan yang harus dipenuhi sebanyak 11 jenis. ■





Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas  
☐ Republika  
☐ Rakyat Merdeka  
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia  
☐ Sinar Harapan  
☐ Seputar Indonesia  
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo  
☐ Suara Pembaruan  
☐ Investor Daily  
☐ Jurnal Nasional
- ☒ Bisnis Indonesia  
☐ Pikiran Rakyat  
☐ Kontan  
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,  
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Skema Pendanaan Belum Ditetentukan	<div>- Skema pendanaan memungkinkan untuk disusun dalam skema PPP antara pemerintah dan swasta</div> <div>- Jembatan Babin adalah salah satu dari lima proyek inftrastruktur di kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang didorong Bappenas untuk mendukung Free Trade Zone (FTZ) BBK</div> <div>- Batam masih menjadi harapan pemerintah untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi</div>	2015				

JEMBATAN BATAM-BINTAN

Skema Pendanaan Belum Ditetentukan

BATAM-Pemerintah akan menentukan skema pendanaan untuk proyek Jembatan Batam-Bintan (Babin) setelah finalisasi bantuan teknis proyek itu selesai paling lambat pada 2013.

redaksi@bisnis.co.id

Wakil Menteri Negara PPN/ Wakil Kepala Bappenas Lukito Dinarsyah mengatakan saat ini proyek senilai Rp6,6 triliun tersebut sudah diusulkan agar masuk revisi blue book.

Bappenas sendiri menargetkan bantuan teknis (technical assistant/TA) proyek tersebut akan selesai pada 2013-2014, sehingga kemudian akan diketahui skema pendanaannya. Ground breaking proyek tersebut ditargetkan pada 2015.

"Pendanaannya terbuka apakah dari dalam negeri atau sepenuhnya swasta, tergantung technical assistant-nya bisa membuktikan dengan PPP (public private partnership) atau kombinasi. TA selesai 2013-2014 dan pembangunan

2015-2016," ujarnya sesuai seminar ekonomi regional optimalisasi revitalisasi fungsi FTZ Batam Bintan Karimun, Senin (4/3).

Dia mengatakan skema pendanaan untuk proyek tersebut memungkinkan untuk disusun dalam skema PPP antara pemerintah dan swasta. Salah satu proyek infrastruktur jembatan yang dikerjakan dalam skema PPP adalah Jembatan Selat Sunda. Namun, tidak menutup kemungkinan jika pendanaan Jembatan Babin melalui pemerintah.

Meski begitu, lanjutnya, pemerintah akan berupaya mendorong peran swasta di samping pendanaan pemerintah agar bisa membiayai sejumlah proyek infrastruktur di kawasan ini. "Kami mendorong private sector agar bisa

masuk karena nilai komersialnya.

Jembatan Babin adalah salah satu dari lima proyek infrastruktur di kawasan Batam, Bintan & Karimun (BBK) yang didorong Bappenas untuk mendukung Free Trade Zone (FTZ) BBK.

PROYEK LAIN

Selain Jembatan Babin, juga ada proyek pengembangan Terminal Bandara Raja Ali Haji Fisabilillah senilai Rp131 miliar dengan pelaksana PT Angkasa Pura. Proyek ini rencananya diremikan pada 2013.

Kemudian proyek satker sementara pembangunan fasilitas Pelabuhan Malarko senilai Rp200 miliar dengan pelaksana Kemenhub. Selanjutnya proyek pelabuhan Kontainer Batam dengan investasi Rp4,55 triliun dengan pelaksana PT Pelindo I. Proyek ini sudah memasuki pra-studi kelayakan dan nota kesepahaman (MoU) dengan shipping line.

Terakhir adalah Pelabuhan Tanjung Sauh di Batam dengan pelaksana Kemenhub dan PT Pelindo II. Tanjung Sauh sendiri saat ini dalam persiapan studi kelayakan, direncanakan ground breaking pada 2017.

5 Proyek Infrastruktur di Free Trade Zone Batam, Bintan, & Karimun

Proyek	Nilai (Rp Miliar)
Jembatan Batam-Bintan	6.600
Terminal Bandara Raja Ali Haji Fisabilillah	131
Fasilitas Pelabuhan Malarko	200
Pelabuhan Kontainer Batam	4.550
Pelabuhan Tanjung Sauh	--

Sumber: Bappenas diolah

Lukito menilai kawasan perdagangan bebas BBK dinilai lebih siap sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan daerah lain untuk menghadapi persaingan pasar Asean.

Dia mengatakan BBK berada di depan untuk meraih pertumbuhan sebagai growth center di Indonesia dalam persaingan dengan pasar Asean.

"Kami percaya beberapa tahun ke depan regional ini yang dinamis, BBK berada di depan sebagai ujung tombak untuk meraih pasar Asean," katanya. Namun, menurutnya kawasan

ini perlu dioptimalkan dari unsur regulasi agar proses investasi terus bertambah sekaligus pertumbuhan pengetahuan industri di BBK.

Dia juga menilai Batam masih menjadi harapan pemerintah untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi karena infrastrukturnya lebih maju, sehingga diharapkan bisa mendorong sinergi dengan Bintan dan Karimun agar infrastruktur bisa saling terhubung. (A77) 2

► Ground breaking ditargetkan pada 2015.

► Jembatan yang dikerjakan dalam skema PPP adalah Jembatan Selat Sunda.

► FTZ BBK lebih siap sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.





Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

# KLIPING BERITA MEDIA CETAK

## Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

Halaman:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

☐ Jan

☐ Feb

☒ Mar

☐ Apr

☐ Mei

☐ Jun

☐ Jul

☐ Agt

☐ Sep

☐ Okt

☐ Nov

☐ Des

2013

☐ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☒ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☐ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Tol Trans-Sumatera Segera Dibangun	<div>- PT. Utama Karya akan membangun tiga ruas jalan tol trans-Sumatera</div> <div>- PT. HK tengah melakukan upaya percepatan untuk pembangunan jalan tol trans-Sumatera diantaranya penentuan trase, pengukuran, perancangan desain dasae, dan survei</div>				PT. Utama Karya	

### TOL TRANS-SUMATRA SEGERA DIBANGUN

JAKARTA—PT Utama Karya akan membangun tiga ruas jalan tol trans-Sumatra untuk tahap awal yakni Palembang-Indralaya, Padang-Sicincin, dan Medan-Binjai karena paling memungkinkan untuk dibebaskan lahannya dalam waktu dekat.

Dirut Utama Karya Tri Widjajanto mengatakan perusahaan tengah melakukan upaya percepatan untuk pembangunan jalan tol trans-Sumatra di antaranya penentuan trase,

pengukuran, perancangan desain dasar, dan survei.

Selain itu, perusahaan juga sudah melakukan upaya pembebasan lahan di ketiga ruas tersebut dengan bekerja sama pemerintah provinsi setempat sehingga dinilai paling mungkin dibangun pada tahap awal.

“Pembebasan lahan di ketiga ruas tersebut merupakan yang memiliki kemungkinan besar dapat segera bebas,” katanya, Selasa (5/3). (Bisnis/15)





Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☒ Kompas  
☐ Republika  
☐ Rakyat Merdeka  
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia  
☐ Sinar Harapan  
☐ Seputar Indonesia  
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo  
☐ Suara Pembaruan  
☐ Investor Daily  
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia  
☐ Pikiran Rakyat  
☐ Kontan  
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,  
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Kemenhub Terbitkan Izin Prinsip Relokasi	<div>- PT. Angkasa Pura I (Persero) masih harus mengantongi surat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati Kulon Progo terkait kesesuaian pembangunan bandara dengan RTRW Pemprov DIY dan Kabupaten Kulon Progo</div> <div>- PT. Angkasa Pura I (Persero) harus segera mempercepat persiapan pembangunan bandara. Sebab harga tanah di titik-titik lokasi calon bandara terus melambung</div>				PT. Angkasa Pura I (Persero)	

BANDARA YOGYAKARTA

Kemenhub Terbitkan Izin Prinsip Relokasi

YOGYAKARTA, KOMPAS — Kementerian Perhubungan telah menerbitkan izin prinsip relokasi Bandara Internasional Adisutjipto, Yogyakarta, dan izin pengelolaan bandara baru. Agar pembangunan bisa segera direalisasikan, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta masih menunggu pengajuan titik lokasi dan prospek investasi bakal bandara baru Yogyakarta dari PT Angkasa Pura I (Persero).

"PT Angkasa Pura I (Persero) mesti mengajukan permohonan penentuan lokasi, daerah mana yang dianggap layak. Menurut rencana tata ruang wilayah (RTRW), peruntukan (pesisir selatan Kulon Progo) tidak masalah, baik untuk bandara," kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X, Senin (4/3), di Yogyakarta.

Setelah mengajukan permohonan ke Gubernur, PT Angkasa Pura I (Persero) selaku pemrakarsa pembangunan bandara baru Yogyakarta masih harus mengajukan izin penetapan lokasi (IPL) ke Kementerian Perhubungan. Setelah IPL turun, pembebasan lahan calon bandara baru bisa dilakukan.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika DI Yogyakarta Tjipto Haribowo mengatakan, pengajuan IPL ke Kementerian Perhubungan membutuhkan beberapa persyaratan, seperti studi kelayakan, survei lapangan, dan rincian penahapan pembangunan. "Tahap-tahap pembangunan harus dicek lebih rinci, seperti pembangunan landasan pacu dan *parallel taxi way* yang harus disesuaikan dengan potensi penumpang serta keberadaan armada pesawat," ujarnya.

Oleh karena itu, sebelum pembangunan dimulai, PT Angkasa Pura I (Persero) masih harus mengantongi surat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati Kulon Progo terkait kesesuaian pembangunan bandara dengan RTRW Pemprov DI Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, dibutuhkan pula surat pernyataan kesanggupan penyediaan lahan dan surat kesanggupan pembiayaan pembangunan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DI Yogyakarta Tavip Agus Rayanto menambahkan, PT Angkasa Pura I (Persero) selaku pemrakarsa pembangunan bandara baru Yogyakarta harus segera mempercepat persiapan pembangunan bandara. Sebab, harga tanah di titik-titik lokasi calon bandara terus melambung, khususnya di sekitar Kecamatan Temon, Kulon Progo.

Desakan juga disampaikan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo yang meminta PT Angkasa Pura I (Persero) segera memproses IPL ke Kementerian Perhubungan agar Pemkab Kulon Progo bisa segera mengukur tanah calon bandara. Rencananya, total lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan bandara 637 hektar.

Sejak awal rencana pembangunan bandara baru, Gubernur DI Yogyakarta berharap proyek nasional ini bisa ditangani oleh investor dalam negeri. (ABK)